

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh *corporate governance* berdasarkan proporsi kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, dan komite audit terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun 2016-2018. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

##### 1. Secara Parsial

- a Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015)
- b Komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak

- (*tax avoidance*). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Oktovian (2014), Fadhillah (2014) dan Laily (2017).
- c Jumlah dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih (2012).
- d Komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahmi Yahya (2017), Hanum dan Zulaikha (2013); Kurniasih dan Sari (2013) dan Singly dan Surakarta (2015).
2. Proksi kepemilikan insitusional, komposisi dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, dan komite audit secara simultan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia tahun 2016-2018.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya bisa mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lain yang mempengaruhi *tax avoidance* selain 4 variabel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah rentan waktu pengambilan data, sebaiknya lebih dari 3 tahun apabila data yang diperlukan telah dipublikasikan semua.
3. Peneliti selanjutnya agar bisa meneliti pada Indeks Saham Syariah di sektor lainnya selain pertambangan.
4. Untuk pemerintah agar sekiranya dapat menegaskan dan memperketat penerapan *corporate governance* di Indonesia.